

Lampiran 01

Surat Pengumpulan Data

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
SMP NEGERI 6 SINGARAJA


Jl. BISMA NOMOR 3 KELURAHAN BANJAR TEGAL Telp./Fax.(0362)22847 Kode Pos 81117 SINGARAJA - BALI
FB: SMP NEGERI 6 SINGARAJA Email : smpn6singaraja@gmail.com Blog : www.smpn6singaraja.blogspot.com

KARTU KENDALI SURAT MASUK

INDEK	KODE	NOMOR URUT
	40/074 / SMPN 6 / II / 2020	40
ISI RINGKASAN SURAT :	Pengumpulan data	
DARI / ASAL SURAT :	Undiksha	
TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	LAMPIRAN
2-2-2020	284/00-488-1/DL/2020	-
PENGOLAH :	TANGGAL DITERUSKAN	TANDA TERIMA
	5-3-2020	
CATATAN : 1. Mohon ditindak lanjuti 2. Mohon diizinkan sesuai isi surat 3. Mohon dikordinasikan dengan Guru/Staf terkait 4. Arsip 5.		Kepada TYH : 1. Wakasek 2. Staf Kesiswaan/Kurikulum /Sapras/Humas 3. KTU 4. Koordinator 5. Ketua MGMP 6. dll

Lampiran 02

Surat Keterangan Kepala Sekolah

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Jl. Raya Singaraja Bali 81116
Telepon: (0362)23894, Fax: (0362)23894
Laman: undiksha.ac.id

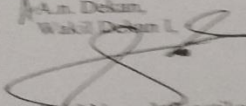
No : 284/UN4ER/1/01/2020
Hal : Pengumpulan Data

Kepada
Yth. Kepala SMP Negeri 6 Singaraja
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Model Pembelajaran Debat Dalam Meningkatkan Kompetensi Berpikir Kritis Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 6 Singaraja dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan observasi, wawancara, tes dan pengambilan data mengenai penelitian model pembelajaran debat diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : I Nyoman Gelgel Anom Sarwa Adi W
Nomor induk Mahasiswa : 1614041016
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 02 Maret 2020
A.n. Dekan,
Wakil Dosen I.

Dr. I Nengah Susatika, S.Pd., M.Pd
NIP. 1980072020016041001

embusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

Lampiran 03

Subjek Penelitian dan Jenis Kelamin

Subjek Penelitian dan Jenis Kelamin

NO URUT	NAMA SISWA	JENIS KELAMIN
1	Gede Bagus Susila Pradnyana Nurcahyo	Laki-laki
2	Gede Andika Pradita	Laki-laki
3	Gede Angga Kurniawan	Laki-laki
4	Gede Arya Darma Suteja	Laki-laki
5	Gede Dika Suryawan	Laki-laki
6	I Gusti Ayu Putu Restu Wahyuni	Perempuan
7	I Gusti Ngurah Satria	Laki-laki
8	Kadek Arta Wijaya	Laki-laki
9	Kadek Vina Mellyani	Perempuan
10	Kadek Wahyu Alpha Kusuma	Laki-laki
11	Komang Darma Putra	Laki-laki
12	Komang Manachika Jingga Ananda PS	Perempuan
13	Komang Pingky Setiasih	Perempuan
14	Komang Putri Ningsih	Perempuan
15	Komang Santya Putri	Perempuan
16	Komang Tika Ariani	Perempuan
17	Made Anggun Liang Harmoni	Perempuan
18	Michael Eubert Agusta	Laki-laki
19	Ni Luh Bhaskarini Mahadewi	Perempuan
20	Ni Luh Shinta Setiani	Perempuan
21	Ni Putu Leoni Manik Agustina	Perempuan
22	Noura Dina Subekti	Perempuan
23	Nyoman Sukmantara Putra	Laki-laki
24	Putu Agus Feri Suryawan	Laki-laki
25	Putu Alven Devanda	Laki-laki
26	Putu Diah Prameswari	Perempuan
27	Putu Dodi Pratama Nugraha	Laki-laki
28	Putu Parwita Varsudewi	Perempuan
29	Putu Santi Adiana	Perempuan
30	Putu Wiarta Mahayana	Laki-laki
31	Putu Wina Prinatha Kusuma	Perempuan
32	Syahrul Adhiyaksa	Laki-laki

Lampiran 04

Pembagian Kelompok Belajar

Kelompok A

No Absen Siswa	Nama Anggota Kelompok
1	Gede Bagus Susila Pradnyana Nurcahyo
2	Gede Andika Pradita
3	Gede Angga Kurniawan
6	I Gusti Ayu Putu Restu Wahyuni
9	Kadek Vina Mellyani

Kelompok B

No Absen Siswa	Nama Anggota Kelompok
32	Syahrul Adhiyaksa
13	Komang Pingky Setiasih
5	Gede Dika Suryawan
16	Komang Tika Ariani
11	Komang Darma Putra

Kelompok C

No Absen Siswa	Nama Anggota Kelompok
7	I Gusti Ngurah Satria
10	Kadek Wahyu Alpha Kusuma
19	Ni Luh Bhaskarini Mahadewi
15	Komang Santya Putri
14	Komang Putri Ningsih

Kelompok D

No Absen Siswa	Nama Anggota Kelompok
20	Ni Luh Shinta Setiani
21	Ni Putu Leoni Manik Agustina
24	Putu Agus Feri Suryawan
4	Gede Arya Darma Suteja
5	Gede Dika Suryawan

Kelompok E

No Absen Siswa	Nama Anggota Kelompok
8	Kadek Arta Wijaya
23	Nyoman Sukmantara Putra
22	Noura Dina Subekti
26	Putu Diah Prameswari
28	Putu Parwita Varsudewi
29	Putu Santi Adiana

Kelompok F

No Absen Siswa	Nama Anggota Kelompok
31	Putu Wina Prinatha Kusuma
27	Putu Dodi Pratama Nugraha
30	Putu Wiarta Mahayana
12	Komang Manachika Jingga Ananda PS
17	Made Anggun Liang Harmoni
18	Michael Eubert Agusta



Lampiran 05

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I Pertemuan I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SMP N 6 Singaraja
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/Genap
Alokasi Waktu : 3 × 45 (1×Pertemuan)

I. Standar Kompetensi

Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia

II. Kompetensi Dasar

Menjelaskan makna kedaulatan rakyat

III. Indikator

1. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat
2. Menguraikan teori-teori kedaulatan

IV. Tujuan Pembelajaran:

1. Siswa dapat menjelaskan makna kedaulatan rakyat
2. Siswa dapat menguraikan teori-teori kedaulatan rakyat

V. Materi Pembelajaran

1. Makna kedaulatan rakyat

Menurut teori, suatu Negara yang akan berdiri harus memenuhi empat syarat sahnya suatu Negara yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari Negara

lain. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata daulat (daulah) artinya kekuasaan (dinasti), pemerintahan. Yang berarti kekuasaan yang tertinggi, dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara yang tidak berada di bawah kekuasaan lain.

2. Teori-teori kedaulatan

a. Teori kedaulatan Tuhan

Penganut teori ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam alam semesta ini adalah ciptaan tuhan dalam pemerintahannya memperoleh kekuasaan tertinggi dari tuhan. demikian pula kedaulatan dari pemerintah berasal dari tuhan. Misalnya kaisar jepang, raja-raja jawa pada zaman hindu menyebut dirinya penjelmaan Dewa Wisnu.

b. Teori kedaulatan raja

Yang memiliki kedaulatan adalah raja atau penguasa, raja merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan di Negara sehingga dapat berkuasa mutlak. Semua kehendak Negara pada dasarnya dari kehendak raja yang berkuasa.

c. Teori kedaulatan rakyat

Dalam teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari rakyatnya sendiri, Negara yang menganut kedaulatan rakyat memiliki cirri-ciri memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan yang mencerminkan kehendak rakyat, dalam pelaksanaan pemilihan umum diatur oleh undang-undang, kekuasaan dilaksanakan oleh badan yang bertugas mengawasi pemerintah, susunan kekuasaan badan di tetapkan dalam undang-undang.

d. Teori kedaulatan hukum

Dalam teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada dalam hukum itu sendiri. Raja, rakyat, menguasa Negara harus tunduk pada hukum Negara karena hukum berada di atas segala-galanya.

e. Teori kedaulatan Negara

Negara sebagai organisasi tertinggi adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Negara. Karena Negara itu sesuatu yang abstrak, maka kedaulatan rakyat itu berada pada pimpinan yang bersangkutan. Pemimpin ini adalah penguasa Negara dan rakyatnya.

VI. Metode pembelajaran:

- 1) Ceramah bervariasi
- 2) Debat
- 3) Tes evaluasi

VII. Model pembelajaran

Model Pembelajaran Debat

VIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

No	Struktur	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru membuka pelajaran dengan memberikan salam• Siswa berdoa untuk mensyukuri kehadirannya dalam kelas• Absensi• Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran	5 menit
2	Kegiatan Inti		
	<i>Eksplorasi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menggali pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan.• Memberi jawaban terhadap pengetahuan awal siswa yang masih miskonsepsi dan mengkaitkan dengan materi yang dikaji.• Guru menyampaikan materi yang akan disajikan yakni kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di	20 menit

	<p>Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk kelompok-kelompok kecil secara heterogen • Menyiapkan media stimulus untuk ber-Debat seperti gambar sesuai kompetensi dasar • Menyiapkan lembar kerja yang berisi panduan terperinci bagi siswa dalam ber-Debat 	
<i>Elaborasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan stimulus dengan cara menampilkan gambar yang sudah disiapkan • Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memilih nilai dalam bentuk gambar secara bebas yang menurutnya benar • Masing-masing kelompok untuk berpikir, menganalisis dan menyelesaikan masalah terkait permasalahan yang diberikan oleh guru melalui gambar yang siswa pilih • Melaksanakan kegiatan diskusi antar kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan • Guru berkeliling untuk memfasilitasi dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar. • Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 	25 menit
<i>Konfirmasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengklarifikasi terhadap nilai yang siswa pilih, jika nilai melalui gambar yang di pilih bersikap positif maka guru menanamkan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. • Sebaliknya jika siswa memilih nilai yang bersikap negatif, maka guru mengklarifikasi bahwa nilai yang di pilih siswa tersebut tidak baik dan tugas guru mengarahkan ke nilai positif kepada siswa agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari • Bersama-sama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang dikaji 	10 Menit

	<p style="text-align: center;">Penutup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian tes evaluasi • Mengarahkan siswa untuk kembali ke masing-masing tempat duduknya dan menyampaikan materi untuk pelajaran berikutnya • Menyanyikan lagu ‘Syukur’ sekaligus guru memberikan pesan moral kepada siswa bahwa dalam bersikap harus sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat. 	<p style="text-align: center;">20 Menit</p>
--	---	---	--

IX. Alat (Bahan)

1. Gambar kasus positif dan negatif dan potongan koran
2. White board + spidol

X. Sumber Belajar

1. Buku LKS kelas VIII semester genap
2. Media masa
3. Iternet

XI. Penilaian

1. Aspek kognitif
 - Teknik Penilaian : Tertulis
 - Bentuk Instrumen : Essay

Tes (Evaluasi Individu)

Indonesia adalah Negara yang menganut kedaulatan rakyat, sehingga pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari rakyatnya sendiri. Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk menyalurkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya pemerintahan.

PERTANYAAN

1. Berdasarkan artikel di atas, identifikasilah beberapa masalah yang berkaitan dengan makna kedaulatan dan teori-teori kedaulatan! (**merumuskan masalah**)
2. Korupsi merupakan tindakan yang merusak kedaulatan rakyat. Hal tersebut menyebabkan banyaknya angka golput dalam pemilu. Bagaimana pendapat anda terhadap fenomena tersebut? Apakah sudah sesuai dengan kedaulatan di Indonesia? Jelaskan! (**memberikan argumen**)
3. Sebagai masyarakat Indonesia bebas menyampaikan inspirasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan rakyat melalui demonstrasi. Berdasarkan hal tersebut bolehkah kita melakukan demonstrasi? Mengapa demikian? (**mengambil keputusan**)

Kunci Jawaban

1. Beberapa masalah yang berkaitan dengan makna dan teori-teori kedaulatan berdasarkan artikel yang berjudul “Kedaulatan Rakyat di Indonesia”.
 - a. Apa saja perwujudan sebuah negara yang menganut kedaulatan rakyat?
 - b. Mengapa masyarakat bisa mengawasi jalannya sistem pemerintahan?
2. Inspirasi rakyat melalui dewan perwakilan rakyat belum terpenuhi, masih banyaknya pelanggaran dari pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pejabat. Hal tersebut menimbulkan banyaknya masyarakat yang golput dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai dewan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, sebagai cerminan kehendak rakyat hendaknya menjalankan tugasnya dengan baik, terhindar dari kasus hukum sehingga bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik.
3. Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana masyarakat bebas menyalurkan inspirasi baik melalui demonstrasi itu sah-sah saja di lakukan di Indonesia sepanjang dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku seperti misalnya tidak merusak fasilitas umum yang jelas merugikan Negara dan bersikap anarkis yang dapat menimbulkan kerusuhan.

Bobot Penilaian

Rentang Skor 1-4

$$Nilai = \frac{SkorPeroldhan}{SkorMaksimal} \times 100$$

Skor Maksimal = 12

Mengetahui,
Guru pamong

Ni Made Telaga
NIP 196404291986012003

Singaraja, 02 Februari 2020

Mahasiswa Peneliti,

I Nyoman Gelgel Anom Sarwa Adi W.
NIM 1614041016



Lampiran 06

Tes Kemampuan Berpikir Kritis

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SINGARAJA
TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS**

PETUNJUK

1. Kerjakanlah soal dengan jawaban yang jelas dan lengkap.
2. Setiap soal bernilai 0-4, sesuai dengan kriteria kemampuan berpikir kritis.
3. Waktu mengerjakan soal 40 menit.
4. Dilarang bekerja sama dalam mengerjakan soal.

KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA

Indonesia adalah Negara yang menganut kedaulatan rakyat, sehingga pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari rakyatnya sendiri. Kedaulatan rakyat memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia sudah membuktikan hal tersebut dengan adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk menyalurkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya pemerintahan.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan Undang-Undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan Undang-Undang.

Meskipun Negara Indonesia telah berhasil dalam menjalankan sistem kedaulatan yakni kedaulatan rakyat, tampaknya masih banyak oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini mencerminkan kehendak rakyat banyak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wakil rakyat dan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami banyak persoalan, yakni maraknya kasus korupsi oleh pejabat Negara. Korupsi merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun apalagi oleh oknum pejabat, ini merupakan hal yang sangat merusak kedaulatan rakyat, bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang salah satunya diwujudkan melalui pemilu yang merupakan gerbang awal para wakil rakyat untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam menjalankan tugas untuk memenuhi apa yang diinginkan rakyat.

PERTANYAAN

4. Berdasarkan artikel di atas, identifikasilah beberapa masalah yang berkaitan dengan makna kedaulatan dan teori-teori kedaulatan! (**merumuskan masalah**)
5. Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini terutama terkait dengan kedaulatan di Indonesia yakni kedaulatan rakyat. Contohnya dalam pemilu, masyarakat cenderung kurang puas terhadap kinerja dari pejabat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat seperti maraknya kasus dari oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya yakni melakukan tindakan melanggar kode etik pejabat dengan melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merusak kedaulatan rakyat. Hal tersebut menyebabkan banyaknya angka gulput dalam pemilu. Bagaimana pendapat anda terhadap fenomena tersebut? Apakah sudah sesuai dengan kedaulatan di Indonesia? Jelaskan! (**memberikan argumen**)
6. Sebagai masyarakat Indonesia bebas menyampaikan inspirasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan rakyat melalui demonstrasi. Berdasarkan hal tersebut bolehkah kita melakukan demonstrasi? Mengapa demikian? (**mengambil keputusan**)
7. Negara Indonesia menerapkan sistem kedaulatan rakyat dengan bercirikan memiliki Lembaga perwakilan rakyat sebagai cerminan kehendak rakyat melalui pemilu. Apa yang

akan terjadi apabila Indonesia tidak menggunakan sistem kedaulatan rakyat dengan baik?
Jelaskan! (**melakukan deduksi**)

8. Kedaulatan yang di anut di Indonesia adalah kedaulatan rakyat tetapi dalam praktik penyelenggaraan Negara juga menganut kedaulatan lain Yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945? Jelaskan! (**melakukan evaluasi**)
9. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum secara langsung. Menurut anda dilihat dari pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam jenis kedaulatan apa? Jelaskan!
(**melakukan induksi/kesimpulan**)

Kunci Jawaban

4. Beberapa masalah yang berkaitan dengan makna dan teori-teori kedaulatan berdasarkan artikel yang berjudul “Kedaulatan Rakyat di Indonesia”.
 - c. Apa saja perwujudan sebuah negara yang menganut kedaulatan rakyat?
 - d. Mengapa masyarakat bisa mengawasi jalannya sistem pemerintahan?
 - e. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat?
 - f. Mengapa Indonesia perlu memilih dewan perwakilan rakyat?
5. Negara Indonesia ialah Negara yang menganut kedaulatan rakyat dimana pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari rakyatnya sendiri. Tetapi kenyataannya inspirasi rakyat melalui dewan perwakilan rakyat belum terpenuhi, masih banyaknya pelanggaran dari pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pejabat. Hal tersebut menimbulkan banyaknya masyarakat yang golput dalam pelaksanaan pemilu. Sebagai dewan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, sebagai cerminan kehendak rakyat hendaknya menjalankan tugasnya dengan baik, terhindar dari kasus hukum sehingga bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik.
6. Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana masyarakat bebas menyalurkan inspirasi baik melalui demonstrasi itu sah-sah saja di lakukan di Indonesia sepanjang dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku seperti misalnya tidak merusak fasilitas umum yang jelas merugikan Negara dan bersikap anarkis yang dapat menimbulkan kerusuhan.

7. Jika bangsa Indonesia tidak menggunakan sistem kedaulatan yakni kedaulatan rakyat dengan baik, kedaulatan rakyat ialah kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sendiri, melalui lembaga perwakilan rakyat sebagai cerminan kehendak rakyat, jika kedaulatan rakyat tidak terlaksana dengan baik maka kemungkinan hal buruk akan terjadi seperti misalnya lebih menonjolkan kepentingan individu dan golongan daripada bangsa dan Negara seperti yang terjadi pada periode 1945 sampai dengan 1959 dan pada orde baru tahun 1966 sampai dengan 1998 posisi pemerintahan lebih kuat daripada rakyat, sehingga kedaulatan rakyat tidak tercapai, karena lembaga perwakilan rakyat seolah-olah hanya mengikuti kehendak eksekutif/pemerintah.
8. Negara Indonesia ialah Negara yang menganut kedaulatan rakyat tetapi dalam praktik penyelenggaraan Negara juga menganut ajaran kedaulatan-kedaulatan lain yaitu kedaulatan tuhan, kedaulatan Negara, dan hukum. Meskipun menganut kedaulatan lain, tetapi secara umum yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Dimana kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia ada pada rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan hukum dan memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sikap kepribadian bangsa (Pancasila).
9. Dalam sistem pemerintahannya Indonesia menganut kedaulatan rakyat dimana kekuasaan pemerintahan Negara dipisahkan menjadi tiga lembaga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dengan memiliki ciri-ciri memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis atau mencerminkan kehendak rakyat, pelaksanaan pemilihan umum untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara langsung oleh rakyat merupakan jenis kedaulatan rakyat.

Lampiran 07

Data Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Siklus I

No Urut Siswa	Kegiatan Diskusi model deba		Tes Evaluasi		Tes Akhir Siklus I	Nilai Total
	Pertemuan	Pertemuan 2	Pertemuan	Pertemuan 2		
1	78	80	70	73	70	74.2
2	78	80	65	70	62	71
3	78	80	65	65	68	71.2
4	78	80	65	70	75	73.6
5	78	80	65	70	62	71
6	78	80	72	70	70	74
7	75	80	70	70	66	72.2
8	80	81	70	75	79	77
9	75	80	70	60	68	70.6
10	75	80	60	75	60	70
11	75	80	70	73	78	75.2
12	75	80	70	70	65	72
13	75	81	72	70	62	72
14	75	81	70	73	64	72.6
15	75	81	70	75	54	71
16	75	81	70	75	54	71
17	75	81	60	70	55	68.2
18	78	80	70	73	79	76
19	75	81	75	75	55	72.2
20	78	78	77	79	75	77.4
21	78	78	70	74	66	73.2
22	80	81	70	78	75	76.8
23	80	81	60	60	75	71.2
24	78	78	70	70	51	69.4
25	80	81	75	70	65	74.2
26	80	81	75	78	80	78.8
27	78	80	60	65	70	70.6
28	80	81	75	76	75	77.4
29	78	80	60	70	55	68.6
30	78	80	65	70	75	73.6
31	78	80	70	75	67	74

32	78	80	65	73	78	74.8
Nilai Total						2.335



Lampiran 08

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II Pertemuan ke II

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMP N 6 Singaraja
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/Genap
Alokasi Waktu : 3 × 45 (1×Pertemuan)

II. Standar Kompetensi

Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia

II. Kompetensi Dasar

Sikap positif atas perwujudan kedaulatan rakyat dan system pemerintahan Indonesia

III. Indikator

3. Menjelaskan berbagai bentuk sikap positif dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita nasional.
4. Menjelaskan berbagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan.
5. Menjelaskan bentuk-bentuk dan penerapan kedaulatan dan system pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

IV. Tujuan Pembelajaran:

3. Siswa dapat menjelaskan berbagai bentuk sikap positif dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita nasional.
4. Siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan.

5. Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk dan penerapan kedaulatan dan system pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

V. Materi Pembelajaran

1. Berbagai bentuk sikap positif dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita nasional

Berbagai bentuk sikap dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut.

- a. Membiasakan bersikap demokratis dalam berbagai lingkungan kehidupan
- b. Ikut melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
- c. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum
- d. Berusaha menghindari sikap otoriterisme yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan kedaulatan rakyat.
- e. Mendukung program-program pemerintah.
- f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menghormati pejabat yang diberi kekuasaan/wewenang oleh negara/pemerintah.

2. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintah

Partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan dapat dibedakan dalam beberapa aspek sebagai berikut.

- a. Partisipasi di bidang politik, hukum, dan pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.
 - (1) Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.
 - (2) Menaati peraturan hukum yang berlaku.
 - (3) Mendukung program-program pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan.
 - (4) Menolak kebijakan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

(5) Bersedia menjadi saksi di pengadilan.

b. Berpartisipasi di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- (1) Memprakarsai berdirinya koperasi.
- (2) Peduli terhadap lahan kritis.
- (3) Tidak merelakan penebangan hutan secara liar.
- (4) Mengembangkan jiwa wiraswasta.

c. Partisipasi di bidang sosial budaya dan keagamaan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- (1) Mendukung program wajib belajar.
- (2) Mengembangkan budaya daerah dan nasional.
- (3) Menjaga kerukunan antar umat beragama.
- (4) Mengembangkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
- (5) Rajin belajar serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna meningkatkan tarap hidup bangsa.

d. Partisipasi di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut.

- (1) Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (2) Menjalan persahabatan antar suku, antar daerah, dan antar budaya.
- (3) Bersedia menjadi relawan bila negara memerlukan.
- (4) Senantiasa waspada terhadap situasi dan sikap yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

(5) Senantiasa meningkatkan ketahanan diri, ketahanan social, dan nasional.

3. Bentuk-bentuk penerapan kedaulatan dan system pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

a. Dalam kehidupan pribadi di lingkungan keluarga.

(1) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

(2) Disiplin membayar pajak.

(3) Menyukseskan program-program pemerintah (keluarga berencana, transmigrasi, hidup bersih, dan lain-lain)

(4) Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.

(1) Mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan.

(2) Membantu petugas atau pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Membantu tugas-tugas RT/RW dalam menata dan membina kehidupan masyarakat.

(4) Mematuhi berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma hukum.

c. Dalam kehidupan di sekolah.

(1) Melaksanakan segala peraturan yang berlaku di sekolah.

(2) Mengikuti upacara bendera hari senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional.

(3) Menjaga 6K di lingkungan sekolah.

(4) Melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

d. Dalam kehidupan di lingkungan kenegaraan.

(1) Membantu polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

(2) Menghormati pejabat negara yang sedang menjalankan tugas.

(3) Aktif menyampaikan saran dan masukan kepada pejabat yang berwenang.

(4) Mematuhi hukum yang berlaku misalnya Undang-undang lalu lintas.

(5) Membantu aparatur negara dalam menjalankan tugas misalnya sensus penduduk, pemetaan tanah dan lain-lain

VI. Metode pembelajaran:

- 4) Ceramah bervariasi
- 5) Diskusi
- 6) Tes evaluasi

VII. Model pembelajaran

Model Pembelajaran inovatif (*Value Clarification Technique*)

VIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

No	Struktur	Kegiatan Belajar	Waktu
1.	Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru membuka pelajaran dengan memberikan salam• Siswa berdoa untuk mensyukuri kehadirannya dalam kelas• Absensi• Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran	5 menit
2	Kegiatan Inti		
	<i>Eksplorasi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menggali pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan.• Memberi jawaban terhadap pengetahuan awal siswa yang masih miskonsepsi dan mengkaitkan dengan materi yang dikaji.• Guru menyampaikan materi yang akan disajikan yakni sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat Sikap	20 menit

		<p>positif atas perwujudan kedaulatan rakyat dan system pemerintahan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk kelompok-kelompok kecil secara heterogen • Menyiapkan media stimulus untuk ber-Debat seperti gambar sesauai dengan kompetisi dasar • Menyiapkan lembar kerja yang berisi panduan terperinci bagi siswa dalam ber-Debat 	
	<i>Elaborasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan stimulus dengan cara menampilkan gambar yang sudah disiapkan • Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memilih nilai dalam bentuk gambar secara bebas yang menurutnya benar • Masing-masing kelompok untuk berpikir, menganalisis dan menyelesaikan masalah terkait permasalahan yang diberikan oleh guru melalui gambar yang siswa pilih • Melaksanakan kegiatan diskusi antar kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan • Guru berkeliling untuk memfasilitasi dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar. • Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 	25 menit
	<i>Konfirmasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mengklarifikasi terhadap nilai yang siswa pilih, jika nilai melalui gambar yang di pilih bersikap positif maka guru menanamkan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. • Sebaliknya jika siswa memilih nilai yang bersikap negatif, maka guru mengklarifikasi bahwa nilai yang di pilih siswa tersebut tidak baik dan tugas guru mengarahkan ke nilai positif kepada siswa agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 	10 Menit

	<p style="text-align: center;">Penutup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan siswa untuk kembali ke masing-masing tempat duduknya dan menyampaikan pertemuan selanjutnya akan diadakan tes akhir siklus II • Memberikan tes evaluasi • Menyanyikan lagu ‘Syukur’ sekaligus guru memberikan pesan moral kepada siswa bahwa dalam bersikap harus sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat. 	<p>20 Menit</p>
--	---	--	------------------------

IX. Alat (Bahan)

3. Gambar kasus positif dan negatif dan potongan koran
4. White board + spidol

X. Sumber Belajar

4. Buku LKS kelas VIII semester genap
5. Media masa
6. Iternet

XI. Penilaian

2. Aspek kognitif
 - Teknik Penilaian : Tertulis
 - Bentuk Instrumen : Essay

Soal tes evaluasi

10. Apa yang akan terjadi apabila dalam pemilihan umum nilai-nilai demokratis tidak diterapkan dengan baik? Jelaskan! (**melakukan deduksi**)
11. Jelaskan bagaimana pelaksanaan diskusi kelompok yang dihubungkan dengan sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia? Jelaskan! (**melakukan evaluasi**)
12. Bangsa Indonesia ialah bangsa yang menganut system pemerintahan Presidensial, Menurut anda, jelaskan dengan singkat apakah sistem pemerintahan Indonesia yang

sekarang ini sudah sesuai dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial? (**melakukan induksi/kesimpulan**)

Kunci Jawaban

10. Apabila dalam pemilihan umum tidak menerapkan nilai-nilai demokratis dengan baik maka akan menimbulkan konflik antara dua belah pihak yang dapat memecah belah NKRI, kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, dan tidak menghormati pejabat yang diberi kekuasaan/wewenang oleh negara.
11. Contoh penerapan nilai positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat pada saat melakukan diskusi dapat dilihat dari: mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, menghargai pendapat teman. Sikap positif tersebutlah yang seharusnya diterapkan dalam pelaksanaan perwujudan kedaulatan rakyat di sekolah khususnya dalam melakukan diskusi.
12. Bangsa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial dalam praktik penyelenggaraannya sudah mematuhi seluruh ketentuan sesuai dengan ciri-ciri dari sistem pemerintahan Presidensial seperti halnya bangsa Indonesia memilih Presiden secara langsung oleh rakyat, Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Bobot Penilaian

Rentang Skor 1-4

$$\text{Nilai} = \frac{\text{SkorPerolehan}}{\text{SkorMaksimal}} \times 100$$

Skor Maksimal = 12

Keterangan:

- a. Rentang Skor 1-4
- b. $\text{Nilai} = \frac{\text{SkorPerolehan}}{\text{SkorMaksimal}} \times 100$
- c. Skor Maksimal 20

Mengetahui,
Guru pamong

Singaraja, 22 Februari 2017
Mahasiswa Peneliti,

Ni Made Telaga
NIP 196404291986012003

I Nyoman Gelgel Anom Sarwa Adi W.
NIM 1614041016



Lampiran 09

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SINGARAJA
TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS

PETUNJUK

5. Kerjakanlah soal dengan jawaban yang jelas dan lengkap.
6. Setiap soal bernilai 0-4, sesuai dengan kriteria kemampuan berpikir kritis.
7. Waktu mengerjakan soal 40 menit.
8. Dilarang bekerja sama dalam mengerjakan soal.

Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dan Sikap Positif Terhadap Perwujudnya

Indonesia adalah Negara yang menganut teori kedaulatan rakyat di samping menganut teori kedaulatan hukum, dan juga kedaulatan tuhan. Sistem kedaulatan yang diterapkan dalam suatu Negara akan menentukan sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam suatu Negara.

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yang bercirikan (1) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, (2) Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa), untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, (3) Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala Negara, tetapi juga memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, (4) Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum, (5) Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif, (6) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (Presiden) bukan kepada kekuasaan legislatif.

Perlu diakui bahwa bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial salah satunya presiden dipilih secara

langsung oleh rakyat melalui pemilu. Tetapi, dalam pelaksanaan pemilu banyak persoalan yang terjadi seperti (1) sering sekali aktor-aktor politik melakukan kecurangan melalui sebuah fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, pendidikan yang rendah dan ekonomi lemah membuat peluang *money politic* semakin kuat. Jual beli suara dalam pemilu sudah menjadi hal yang wajar dan biasa dalam demokrasi di Indonesia, (2) perbedaan pilihan dalam pemilu sering menyebabkan perpecahan antara kedua belah pihak terhadap calon pemimpinnya sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang dapat memecah belah NKRI.

Untuk mendukung terwujudnya cita-cita nasional berbagai sikap positif yang dapat dilakukan sebagai warga negara yang baik yaitu dengan cara (1) membiasakan bersikap demokratis dalam berbagai lingkungan kehidupan, (2) ikut melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, (3) menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, (4) menghindari sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan kedaulatan rakyat

PERTANYAAN

- 1 Berdasarkan artikel di atas, identifikasilah beberapa masalah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia dan sikap positifnya! (**merumuskan masalah**)
- 2 Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini terutama terkait dengan menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Contohnya dengan mengadakan pemilihan eksekutif maupun legislatif secara langsung, sering terjadinya *money politic* dan perselisihan antara kedua belah pihak yang dapat memecah belah NKRI. Tentunya sikap tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Bagaimana pendapat anda terhadap fenomena tersebut? Apakah sikap tersebut menunjukkan sikap positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia? Jelaskan! (**memberikan argumen**)
- 3 Setiap tahun ajaran baru diadakan pemilihan ketua kelas, setiap anggota wajib berpartisipasi untuk memilih ketua kelas, ada seseorang siswa yang acuh tak acuh dan tidak berpartisipasi ikut memilih ketua kelas. setujukah anda terhadap sikap seorang siswa tersebut? Jelaskan! (**mengambil keputusan**)

- 4 Untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia berbagai sikap positif yang harus dilakukan warga negara Indonesia salah satunya ialah menghindari sikap-sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan kedaulatan rakyat. Apa yang akan terjadi apabila dalam pemilihan umum nilai-nilai demokratis tidak diterapkan dengan baik? Jelaskan! **(melakukan deduksi)**
- 5 Dalam proses pembelajaran terjadi diskusi bersama dengan anggota kelompok belajar, yang membahas soal yang diberikan oleh guru. Jelaskan bagaimana pelaksanaan diskusi kelompok yang dihubungkan dengan sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia? Jelaskan! **(melakukan evaluasi)**
- 6 Dalam menjalankan sistem pemerintahannya Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yang bercirikan (1) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, (2) Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa), untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, (3) Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala Negara, tetapi juga memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, (4) Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum, (5) Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif, (6) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (Presiden) bukan kepada kekuasaan legislatif. Menurut anda, jelaskan dengan singkat apakah sistem pemerintahan Indonesia yang sekarang ini sudah sesuai dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial? **(melakukan induksi/kesimpulan)**

Kunci Jawaban

1. Beberapa masalah yang berkaitan dengan makna dan teori-teori kedaulatan berdasarkan artikel yang berjudul “Sistem Pemerintahan di Indonesia dan sikap positif dalam perwujudannya”.
 - g. Apakah negara Indonesia sudah menganut sistem pemerintahan presidensial dengan baik?
 - h. Mengapa dalam pelaksanaan pemilihan legislatif maupun eksekutif masih bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia?
 - i. Mengapa dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita nasional diperlukan sikap positif warga negara Indonesia?

2. Negara Indonesia ialah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, dalam praktik penyelenggaraannya presiden (eksekutif) dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Tetapi dalam praktik penyelenggaraannya sering dilakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia seperti terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh aktor-aktor politik agar memenangkan calonnya. Selain memberikan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat juga akan memiliki pemimpin yang notabena tidak memiliki kejujuran sebagai pemimpin. Demi melahirkan seorang pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi negara Indonesia, seharusnya warga negara Indonesia menghindari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
3. Permasalahan yang terjadi seperti persoalan di atas yaitu salah satu murid yang bersikap acuh tak acuh dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas. sikap tersebut mencerminkan sikap yang tidak baik dalam penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Sikap yang semestinya dilakukan yaitu memberikan suatu aspirasi dengan berpartisipasi memilih ketua kelas untuk melahirkan pemimpin yang diinginkan.
4. Dalam pemilihan umum jika ingin memperoleh pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi negara dan bangsa Indonesia dan terhindar dari konflik, nilai-nilai demokratis haruslah dijunjung tinggi demi tetap utuhnya NKRI seperti tidak menggunakan unsur SARA terhadap calon yang minoritas, tidak menggunakan *money politic*, dan menerima dengan lapang dada apabila calon yang kita pilih kalah. Apabila dalam pemilihan umum tidak menerapkan nilai-nilai demokratis dengan baik maka akan menimbulkan konflik antara dua belah pihak yang dapat memecah belah NKRI, kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, dan tidak menghormati pejabat yang diberi kekuasaan/wewenang oleh negara.
5. Sekolah merupakan lembaga resmi yang bertugas mendidik anak-anak bangsa untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang. Moral dan karakter siswa yang terbentuk melalui pendidikan dan aktivitas di sekolah akan sangat menentukan karakter dan moral masyarakat pada masa yang akan datang. Contoh penerapan nilai positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat pada saat melakukan diskusi dapat dilihat dari: mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, menghargai pendapat teman. Sikap

postif tersebutlah yang seharusnya diterapkan dalam pelaksanaan perwujudan kedaulatan rakyat di sekolah khususnya dalam melakukan diskusi.

6. Bangsa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial dalam praktik penyelenggaraannya sudah mematuhi seluruh ketentuan sesuai dengan ciri-ciri dari sistem pemerintahan Presidensial seperti halnya bangsa Indonesia memilih Presiden secara langsung oleh rakyat, Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala Negara, tetapi juga memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum, Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif, Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (Presiden) bukan kepada kekuasaan legislatif.



Lampiran 10

Data Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Siklus II

Tabel 4.4. Data hasil Kemampuan Berpikir kritis Siswa Siklus II

No Urut Siswa	Kegiatan diskusi kelompok		Tes Evaluasi		Tes Akhir Siklus II	Nilai Total
	Pertemuan 1	Pertemuan 2	Pertemuan 1	Pertemuan 2		
1	80	85	80	85	88	83.6
2	80	85	80	80	80	81
3	80	85	80	80	88	82.6
4	80	80	78	85	88	82.2
5	80	85	75	83	80	80.6
6	80	85	78	80	83	81.2
7	80	82	80	82	88	82.4
8	83	85	80	82	88	83.6
9	80	82	80	80	83	81
10	80	82	78	80	85	81
11	80	82	80	83	85	82
12	80	82	80	80	80	80.4
13	82	82	78	83	85	82
14	82	82	80	83	80	81.4
15	82	82	78	80	85	81.4
16	80	80	80	80	80	80
17	82	82	78	80	75	79.4
18	80	82	83	84	88	83.4
19	82	82	78	78	75	79
20	80	80	80	80	83	80.6
21	80	80	80	80	88	81.6
22	83	85	78	80	80	81.2
23	83	85	78	80	80	81.2
24	80	80	80	80	80	80
25	83	85	75	75	78	79.2
26	83	85	78	80	88	82.8
27	80	80	70	78	80	77.6
28	83	85	78	80	88	82.8
29	80	82	75	75	75	77.4
30	80	80	78	78	78	78.8

31	80	80	78	78	83	79.8
32	80	80	78	78	80	79.2
Nilai Total						2.590
Rata-rata						80



DOKUMENTASI



Gambar 01. Foto SMP 6 Singaraja



Gambar 02. Foto pada saat Belajar Kelompok



Gambar 03. Foto pada saat pemberian test kepada siswa

RIWAYAT HIDUP



I Nyoman Gelgel Anom Sarwa Adi Widagda lahir di desa songan pada tanggal 23 february 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Putu Anom Sarwa Ada dan Ibu Ni Ketut Simbulantari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama hindu. Saat ini, penulis beralamat di Jalan Dewi Sartika Utara jalan Bangao Nomer 5 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Songan dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Labotarium dan lulus pada tahun 2013. Dan pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 3 Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 Program Studi PPKn di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Pada semester akhir tahun 2020 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Model Pembelajaran Debat dalam Meningkatkan Kompetensi Berpikir Kritis Pada Pelajaran PPKn Siswa Kelas ^{VIIIa} di SMP Negeri 6 Singaraja”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 PPKn di Universitas Pendidikan Ganesha.